

## DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI Jateng. (2020). *No Title*. <https://jateng.bpk.go.id/periksa-belanja-infrastruktur-11-pemda-bpk-temukan-kekurangan-volume-pekerjaan-senilai-rp8986-miliar-2/>
- Gagola, L., Sondakh, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 108–117. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15330>
- Handayani, S. (1988). *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*. Haji Masagung.
- Hovart, A. (2005). *Why Does Nobody Care about The Absorption?* (No. 258).
- KSAP. (2006). *Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*.
- Kusuma Negara, P., Handayani, L., & Effendy, L. (2018). Studi Kasus Fenomena Tingkat Serapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi,* 19(1), 76–91. <https://doi.org/10.18196/jai.190193>
- Masyhuri, dan M. Z. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. Penerbit Alfabeta.
- Mukhtar. (2013). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. GP Press Group.
- Ngurah, I. P., & Kartika, P. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana,* 1, 79–92.
- Putri, C. T. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu*.
- Rerung, E. D., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 192–202. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17947>
- Ruhmaini, R., Abdullah, S., & Darwanis, D. (2019). Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam,* 4(1), 31–

43. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10912>

Setiawan, A. B. (2019). *Expenditure Budget At District in West Java Province*. 5, 1–9.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. *Dpr*, 249.

<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>

Zakiati, M. (2016). *Analisis Serapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Kota ( Skpk ) Pemerintah Kota Sabang*. 5(4), 67–76.

Abdullah, S., & Nazry, R. (2015). Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah Penjelasan Empiris dan Prespektif Keagenan. *Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 6(2), 272–283.

DJPK Kemekeu. (2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. *Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia*, 640.

Ngurah, I. P., & Kartika, P. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 79–92.

Ruhmaini, R., Abdullah, S., & Darwanis, D. (2019). Analisis Serapan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 4(1), 31–43. <https://doi.org/10.24815/jped.v4i1.10912>

Saipi, A. R., Tinangon, J., Suwetja, I. (2018). Analisis Anggaran Kas Sebagai Cabang, Alat Perencanaan dan Pengendalian Kas Pada PT Pelabuhan IV (2)., Bitung. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13, 2.

Yuwono, S. (2008). Memahami APBD dan Permasalahannya: Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Malang: Bayumedia*.

Zakiati, M. (2016). *Analisis Serapan Anggaran Belanja Pada Satuan Kerja Perangkat Kota ( Skpk ) Pemerintah Kota Sabang*. 5(4), 67–76.